

ARTIKEL PENELITIAN DOSEN MUDA (BBI)
TAHUN ANGGARAN 2006



DINAMIKA DUA KOTA TAMBANG :
Perubahan sosial dan munculnya Tambang Rakyat
di Sawahlunto Sumatera Barat dan Sungai Liat Bangka
Pada Masa Reformasi

Oleh
Drs. Zulqayyim, M.Hum.

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
Nomor : 005/SP3/PP/DP2M/II/2006
Tanggal 1 Februari 2006

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG,
SEPTEMBER 2006

Pendahuluan

Jika kita naik pesawat dan melintasi pulau Bangka, kita akan disuguhkan dengan pemandangan berupa ribuan danau-danau kecil yang tersebar di seantero pulau Bangka. Janganlah bersenang hati dulu melihat danau-danau kecil itu, karena danau-danau itu justru bukan bagian dari keindahan alam pulau Bangka. Danau-danau yang jumlah mencapai ribuan itu justru merupakan malapetaka yang tengah dihadapi pulau Bangka. Betapa tidak, asal muasal danau itu adalah bekas tambang timah yang tidak direklamasi kembali, sehingga menimbulkan ribuan danau-danau kecil. Tidak hanya itu saja, danau-danau juga kemudian mengalirkan air yang kotor dan mengandung zat kimia yang merusak kehidupan manusia. Simak misalnya kisah Sungai Rangkul yang membela kota Pangkal Pinang. Jika sebelum reformasi airnya digunakan masyarakat untuk mandi, minum dan juga banyak ikan yang bisa dipancing. Namun sejak berkembangnya tambang in-konvensional di hulu-hulu sungai Rangkul itu, air yang dulu jernih itu sekarang telah menjadi kotor dan mengandung lumpur-lumpur yang berasal dari air penyedok tambang in-konvensional. Praktis air sungai itu tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat.¹

Tidak jauh berbeda dengan tambang yang terdapat Sungai Liat pulau Bangka, hal yang sama juga ditemukan di kota Sawahlunto di Sumatera Barat. Sawahlunto yang telah menjadi kota tambang sejak tahun 1891 lalu,² namun sejak reformasi aktivitas tambang milik PT BO mulai memperlihatkan grafik menurun. Hal ini disebabkan oleh karena keterlibatan masyarakat, sehingga usaha tambang

¹ Surat kabar *Bangka Pos*, 21 Juni 2004.

² Erwiza, "Miners, Managers and the State: A Socio-Political History of the Ombilin Coal-Mines, West Sumatra 1892-1996". *Phd. Dissertation*. University Amsterdam 1999.

perusahaan milik pemerintah itu sedikit demi sedikit hilang kedigdayaan. Persoalan persaingan dalam merebut lahan tambang, dan pemasaran batu bara, membuat perusahaan yang telah berumur lebih satu abad itu mengalami kerugian. Puncaknya adalah ketika PT Minang Malindo, sebuah perusahaan yang disinyalir milik anak Gubernur dan anggota DPRD Tk. I Sumatera Barat ikut dalam bisnis tambang rakyat di Sawahlunto.³

Hal yang tidak dapat dielakkan adalah rontoknya bisnis tambang ini dan kemudian ditandai dengan berhentinya beroperasi kereta api, yang membawa batu bara dari Sawahlunto ke Padang.⁴ Dengan tidak adanya kereta api yang membawa batu bara itu, maka rontoklah PT Batu Bara Ombilin (PT BO), dan kemudian menjamurnya tambang-tambang rakyat di Sawahlunto. Jika PT BO Ombilin mengangkut batu bara dengan kereta api, maka tambang rakyat itu mengerahkan armada truk membawa batu bara ke Padang. Kehadiran armada truk ini tentu saja lebih menghidupkan ekonomi masyarakat, karena armada truk itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar.

Defenisi yang baku tentang tambang rakyat sebenarnya belum ada. Menurut Departemen Pertambangan dan Energi, ada 3 kategori tambang yaitu tambang resmi, tambang tanpa izin (Peti) dan tambang liar.⁵ Tambang resmi adalah tambang yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan yang mendapat izin resmi dari pemerintah. Peti atau pertambangan tanpa izin adalah tambang

³ Erwiza Erman *Illegal Mining in West Sumatra: Access, Actors, and Agencies In the Post Suharto-era*. Makalah, 2 Agustus, 2004.

⁴ "Tak Ada Lagi Kereta Yang Akan Lewat", dalam harian *Mimbar Minang*, 22 Juni 2002.

⁵ Wawancara kepala Dinas Pertambangan Sawahlunto dengan Harian *Singgalang*, 12 Mei 2002.

yang dilakukan oleh masyarakat ditanah miliknya sendiri, namun tidak ada izin dari pihak pertambangan, sedangkan tambang liar adalah penambangan secara liar dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah atau perusahaan pemerintah. Untuk pulau Bangka, tambang ini lazim disebut tambang in-konvensional.

Hanya saja, sebagaimana pencemaran lingkungan yang terjadi di pulau Bangka, hal yang sama juga tidak dapat dielakkan terjadi di Sawahlunto. Munculnya ratusan danau-danau kecil pada bekas tambang-tambang rakyat menjadi konsekwensi logis yang tak dapat dielakkan, karena pada tambang rakyat ini tidak ada dilakukan reklamasi. Bahkan, danau Kandis misalnya merupakan danau yang berasal dari penggalian tambang, yang tidak sempat direklamasi dan kemudian menjadi danau yang cukup besar dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi.

Satu sisi, kehadiran tambang rakyat pada dua kota itu membawa dampak negatif, terutama pengrusakan lingkungan. Namun pada sisi lain, menimbulkan gairah ekonomi bagi masyarakat. Jika sebelum ini tambang dikuasai secara penuh oleh negara, namun sejak era reformasi masyarakat sudah dapat pula menikmati hasil bumi yang melimpah ruah itu. Simak misalnya ungkapan dari Bahar, seorang penduduk asli Talawi : “Sejak zaman Kolonial Belanda sampai Orde Baru, kekayaan alam yang terdapat di tanah nenek moyang kami sendiri, namun kami belum pernah merasakan manisnya uang dari batu yang hitam (batu bara) ini. Selama ini, kan orang luar saja yang mengambilnya. Jadi, sudah saatnya penduduk asli yang menikmati hasil kekayaan alam ini.”⁶

⁶ Wawancara dengan Bahar, 16 Maret 2005.

Begitu juga pandangan masyarakat di Sungai Liat tentang tambang rakyat. “Kami selama ini hanya jadi penonton saja, ketika orang-orang mengambil timah di tanah kami sendiri. Bahkan, kami dianggap maling, jika ketahuan membawa timah dan kemudian dihukum seperti kami membawa ganja saja”. Begitulah ucapan Yusuf, seorang penambang rakyat di Sungai Liat.⁷ Pada akhirnya, tidaklah mengherankan, jika pada dua kota tambang ini bermunculan tambang-tambang rakyat yang mencapai ribuan banyaknya. Tambang rakyat inilah yang kemudian menambah gairah kehidupan masyarakat kota tambang itu, menggantikan gairah lama yang dikuasai oleh karyawan perusahaan Tambang Batu Bara maupun PT Timah.⁸ Dengan demikian, denyut kota tidak saja diciptakan oleh walikota, perusahaan tambang, akan tetapi justru melalui tambang rakyat inilah, sejak era reformasi ini menambah dinamika dua kota tambang itu. Dalam konteks inilah, penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam tentang dinamika dua Kota Tambang yaitu Sawahlunto Sumatera Barat dan Sungai Liat Bangka pada masa Reformasi.

Perumusan Masalah

Studi ini akan mengkaji dinamika kota Sawahlunto dan kota Sungai Liat Bangka pada masa Reformasi. Penekanan pada masa Reformasi adalah untuk melihat geliat kota, setelah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hasil

⁷ Wawancara dengan M. Yusuf, di Sungai Liat Bangka 20 Juli 2004.

⁸ Pada masa keemasan tambang, yang bergairah adalah karyawan tambang. Di Sawahlunto, mobil-mobil milik karyawan PT Batu Bara Ombilin dengan plat BARO (Ba untuk koe Sumbar RO untuk kode karyawan PT BO), sedangkan di Sungai Liat, semua fasilitas umum seperti listrik, air, jalan dan telepon milik PT Timah. Sekarang ini, kedua perusahaan ini mencapai titik paling lesu dalam bisnisnya, sehingga banyak fasilitasnya yang terbengkalai dan bahkan kantor-kantornya banyak yang ditinggalkan begitu saja.

tambang. Jika pada masa-masa sebelumnya yaitu mulai ditemukannya batu bara dan timah sejak zaman kolonial Belanda sampai zaman Orde Baru, penguasa tunggal atas tambang adalah pemerintah. Namun, sejak era reformasi 1998, secara langsung rakyat telah ikut terlibat dalam pengelolaan batu bara dan timah, sehingga gairah ekonomi masyarakat dari tambang ini meningkat secara tajam. Hal yang menyolok adalah pada zaman Orde Baru misalnya, jika ada rakyat yang terlibat dalam bisnis timah, dan batu bara, maka sikap pemerintah sangat keras dan bahkan sama kejahatannya dengan memiliki narkoba. Namun, sejak masa reformasi ini, pemerintah tidak dapat berkesulitan menghadapi tambang rakyat yang menyebar diberbagai tempat. Untuk Bangka misalnya, diperkirakan tambang rakyat atau disebut in-konvensional mencapai 15.000 buah.⁹ Untuk mempertajam analisis, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterlibatan warga kedua kota tambang dalam tambang rakyat pada masa reformasi ?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan buruh pada era tambang rakyat di dua kota tambang ?
3. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apa saja yang ditimbulkan oleh tambang rakyat sejak era reformasi pada kedua kota ?
4. Bagaimana kebijakan pemerintah kota terhadap tambang rakyat ?

Antara Sekedar Bertahan Hidup dan Memupuk Kekayaan

Melihat perkembangan dunia tambang setelah era reformasi di di Sawahlunto, setidaknya terdapat tiga peyebutan yang lzim dipakai –baik oleh

⁹ Surat kabar *Bangka Pos*, 25 Juli 2003.

masyarakat maupun pemerintah yaitu Tambang Liar, Tambang tanpa izin dan tambang rakyat. Penyebutan ketiga istilah ini lebih mengacu pada proses perizinan yang dilakukan ketiganya, terutama izin untuk menambangkan.

Pertama sekali adalah tambang liar. Penyebutan ini lebih mengacu pada kelompok yang melakukan penambangan di atas tanah konsesi yang telah dimiliki oleh TBO selama ini. Untuk menyebutkan contoh tambang liar ini, maka pihak TBO menyoroti keberadaan PT Minang Malindo. Kasus yang dialami oleh PT MM menjadi pembicaraan yang ramai, karena sejak terjang perusahaan ini. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka tidak mengerjakan penambangan atau operasional di lapangan, akan tetapi lebih bersifat penadah dari hasil tambang yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus batu bara yang berasal dari penambangan Bukit Bual menjadi contoh proses kerja PT MM ini. Hal yang tak dapat dipungkiri adalah eksistensi PT MM merupakan tambang yang illegal, namun karena kekuasaan yang bermain menjadi dilegalkan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Barat, terutama melalui KP yang dibuat oleh Zainal Bakar untuk anak dan koleganya. Hal ini menyangkut permainan dari elite Sumatera Barat yang mencoba bermain dalam bisnis batu bara. Dampak dari berlangsungnya tambang illegal, yang dilegalkan ini tidak tanggung-tanggung. Salah satu dampak utama adalah hilangnya armada kereta api pengangkut batu bara.¹⁰ Persoalan kereta api ini, karena juga didominasi tambang tidak hanya satu tangan saja, tetapi oleh banyak orang, sehingga salah satu pemasarannya adalah PT Semen Padang, menjadi rebutan bagi pebisnis ini. Karena persoalan harga yang lebih murah, PT BO pernah menyebutkan bahwa PT Semen Padang merupakan penadah dari batu

¹⁰ Surat kabar *Mimbar Minang*, Juni 2002

bara ilegal yang diambil dari wilayah PT BO. Persoalan ini tidsaklah sesederhana itu, karena 1 abad lebih, pemasok tunggal batu bara untuk kebutuhan PTY Sememn adalah PT BO, sehingga ketika ada kelompok lain yang juga bermain, dominasi mereka juga semakin terancam.

Sejak zaman Belanda samapai zaman Orde Baru, pengelolaan batu bara hanya berada dalam satu tangan yaitu PT BO, maka sekarang diambil oleh banyak orang. Konsekwensinya adalah kalau kereta api dikuasai oleh PT TBO, maka penambang diluar itu menggunakan armada truk untuk mengangkut batu bara. Akibat yang tidak dapat dihindari adalah kereta api menjadi gulung rel dari Sawahlunto ke Padang¹¹

Tambang tanpa izin sebenarnya eufemisme dari penyebutan tambang liar. Penyebutan ini terutama diarahkan pada penambang-penambang liar, yang berasal dari masyarakat. Masyarakat ini terutama menambang di sekitar kampung-kampung mereka sendiri. Mereka yang selama ini tidak pernah menikmati batu bara, kemudian mengetahui di sekitar kampungnya ada batubara, maka mereka menambangnya.¹²

Tambang rakyat, penambangan yang dilakukan oleh. Peta Peta soalan tambang sebenarnya tidak bisa menyebutkan masyarakat sebagai sebagai penambang liar, akan tetapi pertambangan rakyat. Ada banyak hal yang berlangsung sesungguhnya dalam proses tambang rakyat ini. Lebih dari dari 1 abad batu bara di Ombilin (jika kita ambil patokan 1891 sebagai awalnya), maka

¹¹ Zaiyardam Zubir, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai*, Padang: Andalas University Press, 20006.

¹² *Wawancara* dengan Edwar

boleh dikatakan masyarakat secara langsung tidak pernah menikmati hasil kekayaannya itu. Mengenai hal ini, seringkali dikatakan bahwa antara pengusaha, penguasa dan rakyat sama-sama melakukan penjarahan terhadap kekayaan alam. Hanya saja ketiganya memiliki perbedaan yang sangat besar.

Pengusaha dan penguasa menjarah kekayaan alam, hutan ataupun tanah rakyat dilindungi oleh UU, yang mereka buat sendiri. Jadilah penjarahan mereka legal. Motivasi mereka pun berbeda, kalau pengusaha dan penguasa menjarah untuk menumpuk kekayaan, maka rakyat menjarah hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hal itulah dilakukan oleh tambang rakyat, yang hanya sekedar untuk bertahan hidup. Apalagi proses penambangan rakyat itu berlangsung sejak krisis moneter melanda republik ini.

Tampaknya secara etimologi peristilahan illegal mining dan legal tak lepas dari perpektif siapa yang memegang kekuasaan, kriteria-kriteria hukum, jumlah modal serta kemampuan teknologi. Realitas yang ada, masyarakat sekitar area pertambangan tak akan pernah menikmati kekayaan alam mereka sendiri selama mereka hanya sebagai penonton. Sama halnya dengan kasus-kasus penebangan hutan, yang benar-benar menikmati hutan adalah mereka yang dapat akses langsung ke hutan dan hanya memiliki modal dan peralatan yang cukup untuk memproduksi dalam jumlah massal, yang dalam hal ini adalah cukong penyandang dana. Hal itu boleh dikatakan bahwa para kompetitor mereka nyaris tak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan tambang rakyat versus PT. BO, namun mereka jauh lebih banyak mengeruk hasil tambang itu sendiri.

Sisi penting dari dinamika reformasi adalah akibat baik dari berkembangnya pertambangan sejak masa post Suharto, munculnya PT. MM,

berdirinya koperasi sebagai anak angkat PT. BO, membangkitkan sektor ekonomi lain: upah penambang liar atau apakah penambang rakyat yang meningkat, menjamurnya kedai-kedai makanan, pemukiman, dan banyaknya dibuka pusat hiburan menandakan kebangkitan ekonomi rakyat setempat. Kelihatan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Dasar pertimbangannya adalah keadaan pertambangan di Sawahlunto ini sebenarnya sangat rapuh karena mengandung konflik yang terbentuk antara pihak perusahaan PT BO dengan para kompetitornya semisal PT MM yang sesungguhnya illegal, namun dilegalkan atas perpanjangan tangan penguasa, dan para penambang rakyat yang mengeruk batu bara di lahan PT BO, PT. BO versus PT. SP, gubernur yang melegalkan perusahaan penjarah PT. MM versus penguasa kabupaten atau kotamadya.¹³

Hal yang tidak dapat dielakkan adalah berlaku hukum rimba yang mengambil kesempatan di antara sisa-sisa kejayaan deposit batu bara Ombilin. Mereka illegal karena mereka tak menyetor pajak sebagai pemasukan negara. Kalau penambang rakyat tidak menyetor pajak pada negara, itu sangat bagus sekali, karena penguasa-penguasa di republik ini identik dengan koruptor. Seringkali saya katakan kepada penambang rakyat bahwa mereka menambang hanya untuk sekedar bertahan hidup, sementara penguasa dan pengusaha untuk menimbun kekayaan. Di sini letak perbedaan yang paling penting dari pola penambangan rakyat dengan penguasa dan pengusaha.

PT. MM adalah penambang illegal karena dalam menjalankan bisnis ternyata tak melakukan penambangan bawah tanah, tapi hanya bertindak sebagai cukong kolektor hasil tambang para penambang rakyat. Kerena itu peranan PT

¹³ Surat kabar *Padang Ekspres*, Januari 2003

TBO semakin kecil dilihat dari hambatan-hambatan bisnis dan operasional yang penuh dengan kolusi dan korupsi. Pengertian tambang ilegal tak hanya disandang oleh para penambang rakyat, kelompok yang dioperasikan oleh seorang cukong, tapi kini menjadi terkait dengan persoalan peredaran uang, penguasaan lahan, pengambilan keputusan yang sangat ironis dilakukan secara tertutup dan tidak demokratis bahkan oleh seorang gubernur. Yang tersisa di tambang batu bara Ombilin adalah apa yang dulu menjadi ilegal kini menjadi legal pada tingkat pengambilan keputusan, tidak pada tingkat pelaksanaan penambangan yang tak memenuhi standar lingkungan dan keamanan.

Adalah hal cukup unik (jika saja) sekarang PT TBO memang mati langkah Biaya produksi yang meningkat dari penambangan bawah tanah, berhentinya transportasi kereta api yang mengangkut batu bara ke Padang justru banyak disumbang oleh apa yang dinamakan praktek-praktek ilegal, elit yang memotong jalur kekuasaan dari pusat dan bahkan melangkahi penguasa setempat: tertutupnya jalur demokratis pengambilan keputusan.

Persoalan ini cukup unik di tengah berlakukannya perdagangan bebas di luar sana, karena perusahaan tambang seperti PT. TBO yang tergantung pada tempat tak bisa berpindah markas dan lahan garapan yang lain secara cepat. Mungkin ia tak mengikuti dinamika berkelit mempertahankan daya saing. Contoh yang juga terjadi di Sumbar adalah kehendak sebagian masyarakat dan tokoh Sumbar yang ingin mengembalikan PT. SP dari kekuasaan modal asing CEMEX, suka atau tidak, dengan adanya *spin off*, saya kira juga sebuah bentuk perlawanan terhadap akibat-akibat perdagangan transnasional, serupa yang diserukan oleh para penentang perdagangan bebas beserta organisasi WTO dan perjanjian

perdagangan dunia lainnya. Perdagangan bebas seperti itu pada dasarnya berusaha menyingkirkan halangan-halangan non-tarif seperti birokrasi yang panjang, persoalan hak buruh; mengalahkan negara-negara yang proteksi mereka menghalangi kebebasan dan biaya perusahaan-perusahaan kerana politik proteksi dan regulasi yang melindungi kekayaan lokal dan perusahaan skala kecil dan komunitas lokal, lingkungan dari kehancuran.

Tapi seperti apakah perkembangan di Sumbar berkenaan dengan trend perdagangan dunia yaitu negara disingkirkan dalam bisnis dan perdagangan, jika kita melihat kasus PT TBO yang kian merosot dan kasus penajaulan PT SP. Agak kabur. Pertanyaanya adalah “siapa yang membeli, menguasai, dan menjual siapa”; “apakah praktek-parktek illegal lainnya, di tempat lain, dan dalam kasus lain juga akan mampu melawan hegemoni kekuasaan perusahaan-perusahaan besar lainnya, bahkan perusahaan multinasional yang bergerak di luar tambang atau dalam kasus tambang lainnya?” Kasus tambang Batubara Ombilin adalah kasus yang unik jika dibandingkan dengan kasus PMA Freeport misalnya, yang menyuntik dan ke TNI demi keamanan investassinya, yang bisa mengandalkan bisnis di tempat lainnya di mana ia inginkan.¹⁴

Dengan demikian, wajah pertambangan nyaris selalu buruk. Pertambangan batu bara misalnya merupakan pengerukan sumberdaya yang terkandung di tempat terbuka maupun bawah tanah dan sekaligus penggerusan terhadap hak-hak sipil. Dari segi lingkungan, penambangan batu bara akan mengubah lingkungan sekitarnya menjadi rongsokan karena penggalian yang ditinggalkan. Terciptanya lahan-lahan yang tidak direklamasi kembali oleh perusahaan tambang telah

¹⁴ Surat kabar *Media Indonesia*, Juli 2005.

meninggalkan lahan-lahan yang tidak produktif, perubahan kontur tanah yang mengerikan, kawah-kawah dan danau buatan akibat penggalian di tanah terbuka yang tak bisa dihindarkan, bahkan perubahan ekologi di sekitar area bekas pertambangan merupakan akibat yang tak terelakkan. Kemalangan lingkungan ini, di mana pun tambang dieksplorasi dan dikeruk, memang ibarat pepatah, habis manis sepagi pun dibuang.

Namun studi-studi tentang pertambangan batubara – seperti di Tambang Batu bara Ombilin sejak zaman kolonial Belanda sampai masa menjelang berakhirnya kejayaan dan tersedianya deposit batu bara sekitar tahun 2000-an – tak terlepas dari sejarah konflik berkepanjangan, tak semata-mata persoalan ekologi dan kerusakan tanah yang menyertainya. Hal yang tidak terelakkan adalah, lain zaman ternyata tak lain pula persoalan tambang yang muncul. Pertama, persengketaan antara pemilik modal (pertama-tama kapitalis kolonial Belanda) dan masyarakat pemilik lahan; kedua, persetujuan usaha penghapusan secara total kompensasi hasil tambang atas lahan setelah menghapus atau mengaburkan hak kepemilikan lahan; ketiga, permainan politik di tingkat penguasa, pemuka adat dan pemilik modal, eksploitasi buruh dan soal pemberdayaan masyarakat sekitar area; dan transisi atau pengambilalihan aset dan operasional pertambangan dari pemerintah kolonial ke pemerintah Indonesia.¹⁵

Pola-pola yang sama tampaknya nyaris sama dengan permainan tambang di era pasca Suharto. Perbedaannya mungkin pada pemain yang lebih beragam dibanding dengan masa lalu. Namun ada satu hal yang ditambahkan bahwa karena alasan kebebasan yang dinisbatkan dengan label gerakan reformasi dan gerakan

¹⁵ Zaiyardam Zubir, *op. cit.*

masyarakat sipil, disertai munculnya desentralisasi dan UU No. 22 tahun 1999 hanya bentuk lain salah paham pemaknaan kekuasaan elit, pengusaha, dan cukong-cukong lokal seperti pengelola tambang di masa kolonial yang menyelewengkan pengertian hak-hak sipil dan adat masyarakat setempat. Karena itu penafsiran kekuasaan masyarakat lokal yang terhimpit krisis ekonomi dan pembungkaman aspirasi mengenai hak atas hasil tambang telah mengakar dari masa lalu saya kira sama dengan pengertian yang dipahami oleh penambang pada masa kolonial itu. Faktor kecemburuan sosial yang terpendam sejak lama menjadi pemicu yang tak terelakkan.

Kasus tambang batu bara Ombilin merupakan sebuah kasus simalakama. Seburuk-buruk akibat eksploitasi penambangan adalah sama saja buruknya oleh kedua pihak legal dan yang tak legal. Jika diklaim bahwa hanya PT BO saja yang legal melakukan dan penambangan dan tanpa disaingi oleh investor lain di lahan yang sama, mungkin ini lebih "baik" dengan catatan tingkat KKN-nya rendah. Tapi, atas nama pemberdayaan masyarakat dan hak-hak sipil dan hak adat, akibat yang lebih buruk juga terjadi terhadap lingkungan, kendati dari segi pendapatan kelompok-kelompok kecil masyarakat yang belum mencicipi kekayaan alam di tanah mereka akan terangkat. Komoditas tambang adalah lahan subur korupsi dan kolusi di mana pihak yang kecil akan selalu tersingkir, kecuali para cukong dan pengusaha dan pengusaha koruptif.

Beberapa waktu lalu, pengusaha dari Cina tertarik untuk menanam modalnya di Sawahlunto. Saya belum dengar MOU kedua belah pihak, namun bagi investasi asing kepastian hukum seperti ini menjadi sangat penting, karena mereka ingin uang yang ditanamkan di Sawahlunto terjamin. Persoalan ini

memang menjadi berat, karena suburnya tambang rakyat membuat mereka menjadi was-was, karena ketakutan para pemodal atas ketidaknyamanan untuk menanamkan modal. Toh bagi pengusaha, syarat mutlak bagi mereka adalah kestabilan politik dan keamanan sehingga mereka mau menanamkan modalnya. Sekali lagi, ini kan urusan pengusaha, yang sesungguhnya tidak menyangkut persoalan rakyat, karena kaum kapitalis itu kan cuma mencari untung dari kekayaan alam yang ada.

Kalau tambang rakyat digembor-gemborkan dapat merusak lingkungan oleh pemerintah. Realitas di lapangan memperlihatkan fakta yang berbeda. Dari 6 tambang rakyat yang pernah diteliti, terlihat di berbagai tempat di Sawahlunto, mereka justru mengerjakan dengan alat-alat sederhana seperti linggis, cangkur, dan tembilang. Berbeda dengan tambang legal, yang menambang menggunakan alat-alat besar. Kasus tersaru adalah munculnya danau yang cukup besar di Salak, sekitar akhir april lalu 2003 lalu.¹⁶

Bermula dari penambangan yang dilakukan oleh PT Pama di Salak. Ketika melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat di lokasi penambangan di Salak, sebuah traktor menggali batu bara di atas aliran sungai bawah tanah. Karena terlalu dalam, traktor ini sampai pada permukaan sangai bawah tanah itu sehingga tercebur ke sungai bawah tanah itu. Akibat yang tidak dapat dihindari adalah traktor itu lenyap dan terbenam ke dalam sungai bawah tanah itu. Dari lobang terbenamnya traktor itu, secara perlahan-lahan membentuk permukaan air, yang makin lama makin meluas. Hal yang tak dapat dicegah adalah munculnya danau yang sesungguhnya dan luasnya diperkirakan mencapai 3 ha.

¹⁶ Surat kabar *Padang Ekpress*, April 2003.

Sekarang ini, danau itu menjadi tempat hiburan bagi masyarakat. Persoalan berikutnya muncul adalah perselisihan antarmasyarakat yang ingin mengklaim danau itu sebagai wilayah mereka. Sudah bacakak banyak pula orang gara-gara ingin menguasai danau itu. Perselisihan itu muncul karena dari danau itu muncul mata pencaharian baru dalam bentuk menyewakan berbagai permainan di atas air seperti sampan dan sepeda air.

Di Bangka, airpun ada mngenang dimana-mana. Dibandingkan dengan Sawahlunto, jumlah danau yang terdapat di Bangka jauh lebih banyak lagi. Wawancara dengan seorang pegawai Dinas Pertambangan di Sungai liat dikatakannya bahwa jumlah tambang inkonvensional di Bangka mencapai 12.000 buah. Jika diandaikan setiap tambang inkonvensional itu mmiliki 2 wilayah penggalianm, maka jumlah danau-danau buatan itu mencapai 24 ribu buah. Angka yang luar biasa, sebagai dampak dari tambang inkonvensional.¹⁷

Untuk tambang yang dilakukan oleh rakyat ini, di Bangka dinamakan tambang in-konvensional. Tambang inkonvensional ini lebih mendekati pada tambang rakyat, karena umumnya dilakukan oleh rakyat. Walaupun demikian, tingkat kerusakan yang terjadi akibat tambang rakyat ini tidaklah separah dari tambang yang memiliki KP ataupun izin lainnya. Pada tambang rakyat, mereka umumnya menggunakan mesin dalam ukuran kecil saja. Walaupun demikian, proses penambangan yang dilakukan terus menerus, tetap saja jumlah areal yang mereka gali itu cukup luas juga, sehingga setiap penggalian itu askan berakhir dengan munculnya sebuah danau baru. Untuk ukuran tambang rakyat ini, luas danau itu hanyalah sekitar 10 kali sepuluh meter, dibandingkan dengan yang

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad, Pegawai Dinas Pertambangan Kabupaten Sungai Liat.

memiliki kp, maka bisa mencapai 100 kali 100 meter. Hal ini disebabkan oleh karena pada tambang yang memiliki KP, mereka memakai alat berat untuk menggali tanah, sedangkan tambang rakyat hanya memakai mesin penyemprot air saja. Cara kerjanya adalah air disemprotkan pada tanah-tanah penggalian, kemudian disedot kedalam limbang dan kemudian dibantu air juga disishkan antara tanah dengan timah. Jika rezeki lagi bagus, mereka akan mendapatkan timah yang banyak. Namun jika lagi apes, maka sehari-hari menggali timah, untuk makan siap saja tidak mencukupi.

Dalam dunia tambang ini, ada banyak kepercayaan yang muncul dalam masyarakat. Salahsatunya adalah timah itu memiliki peri penjaganya. Setiap penambang haruslah berusaha untuk tidak menyakiti peri ini sehingga bereapa pantangan jangan dilanggar seperti takabur, mengucapakan kata-klata kotor seperti makian, dan hinaan dalam lobang, tidak boleh pipis dan sebelum dilakukan pembukaan penambangan, diaakan sesajen untuk peri, sehingga peri itu membawakan timah yang banyak.¹⁸

Untuk ukuran masyarakat, penambangan ini akhirnya sekedar bertahan hidup saja. Dapat dikatakan demikian, karena usaha mereka ini tidak memiliki modal besar, sehingga walaupun kandiungan timah banyak terdapat didaerah mereka, namun keterbatasan alat membuat mereka tidak dapat menambang timah lebih besar lagi.

Bandingkan dengan pengusaha atau penguasa yang memiliki modal yang lebih besar. Eko Mauluna Ali misalnya sebagai Bupti Sungai Liat, ia memiliki eskavator ratusan jumlah, sehingga dengan alat yang ada, ia dan keluarganya

¹⁸ Wawancara dengan Rizal, seorang Penambang Rakyat.

mampu mengeruk timah dalam jumlah yang besar. Karena kekuasaan yang dimilikinya, maka ia juga dapat mengeluarkan Perda, yang kemudian timah yang didapatkan bisa langsung di ekspor keluar negeri.

Eksport timah keluar negeri ini sesungguhnya menjadi bisnis yang ramai di Sungai Iiat atau Bangka. Bandingkan saja misalnya harga timah di Bangka Rp. 30.000.-, sedangkan diluar negeri, terutama Singapura, Thailand dan Hongkong mencapai Rp. 50.000.- Selisih harga itu mencapai Rp. 20.000. dalam setiap kg nya. Jika mampu menyeludupkan 1 ton, maka sudah mencapai 20.000.000.- dalam setiap ton. Kemampuan penyeludup biasa mencapai 30 sampai 50 ton, sehingga dalam setiap penyeludupan, mereka mendapatkan keuntungan mencapai 1 milyar rupiah.¹⁹ Penyeludupan seperti ini bisa berlangsung 1 kali dalam sebulan, untuk seorang toke Timah. Sementara toke timah yang terdapat di Bangka puluhan banyaknya. Siapa yang tidak tertarik ?

Pola kerja penyeludupan itu adalah kapal-kapal nelayan membawa timah 1 sampai 2 ton ketengah laut. Dilaut lepas, sudah ada menunggu kapal-kapal besar, dan transaksi dilakukan ditengah laut itu. Setelah itu, kapal besar itulah dengan dokumen asli tapi palsu yang akan menjual timah ke luar negeri nantinya.

Perkembangan lain yang tidak dapat dikontrol dari perkembangan timah ini adalah maraknya dunia malam. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketika reformasi bergulir dan pada saat yang sama rakyat bisa melimbang atau menambang timah secara bebas, maka mengalirlah uang secara lebih merata dalam masyarakat. Jika pada masa orde baru, masyarakat yang mengambil timah

¹⁹ Wawancara dengan Burhan, seorang pemilik kapal, yang biasa digunakan untuk menyeludupan timah di Pangkal Balam.

akan diburuh seperti seorang pedagang narkoba,²⁰ maka sekarang barang haram itu dapat ditambang saja sesuka hati, sehingga mansisnya uanh timah secara nyata sudah dapat dinikmati rakyat banga. Itulah hasil reformasi yang mereka nikmati. Sejalan dengan itu, sebagaimana di sawahlunto, PT Timahpun mengalami kebangkrutan dan seikit-sedikit demi sedikit, perusahaan yang pernah jaya selama 1 abad itupun menunggu kehancurannya.²¹

Proses untuk menambang itupun sangat sederhana. Dengan sebuah piring plastik misalnya, seorang anak SD sambil bermain-main di tailing, maka mereka bisa mendapat kan timah 2 canting dalam 2 jam.²² 1 canting itu harganya 35-40 ribu, sehingga anak-anak yang bermain disore hari saja bisa mendapatkan uang 50 ribu dalam sehari. Penjualannyapun mudah sekali, karena setiap sore ada pedagang keliling yang membeli timah hasil anak-anak itu berkeliling kampung untuk membelinya.²³

Persoalan pembeli timah inipun menjamur hampir setiap kampung. Toke-toke itu terdapat disetiap desa, kecamatan dan kabupaten. Tingkatan-tingkatan ini

²⁰ Selama satu abad, PT Timah merupakan pemegang tunggal dalam penambangan timah. Jadi, jika ada masyarakat yang mencoba mengambil kekayaan alam itu diatas tanahnya sendiri, maka hukuman sama dengan seorang pedagang atau pengedar ganja. Begitu kuatnya dominasi negara, sehingga rakyat tidak pernah mendapatkan dan merasakan manisnya uang dari timah itu. Kejadian ini sama saja dengan yang berlangsung pada masyarakat di Sawahlunto.

²¹ Masa jayanya, bupati Bangka harus sowan dulu ke direksi timah, karena semua fasilitas di bangka itu merupakan milik PT Timah. Bahkan, sudah biasa, seorang bupati akan antri menunggu giliran untuk bertemu dengan direktur timah. Bahkan, dalam upacara-upacara resmi seperti 17 agustusa, maka protokol akan mengucapkan yang terhormat pertama kepada direktur timah, direksi timah. Setelah itu bari kepada bupati. Hal pokok adalah kedudukan bupati jauh lebih rendah dibandingkan dengan jabatan seorang direksi PT Timah. Masa itu telah berlalu, sejalan makin runtuhnya hegomoni pemerintah dalam dunia tambang.

²² 1 canting itu biasanya digunakan gelas susu atau aqua. 1 canting bisa beratnya 1,3 sampai 1,4 kg.

²³ Wawancara dengan Rahman, seorang toke timah yang biasanya membeli timah dari anak-anak.

sesuai dengan modal yang dimilikinya. Toke di tingkat desa biasanya dimodali oleh toke-toke kabupaten. Toke kabupaten inilah yang sesungguhnya menjadi raja timah. Untuk propinsi bangsa, salah seorang toko besar adalah pemilik penerbangan Sriwijaya Airline, dan Jatayu. Keduanya merupakan Cina bangka yang bermain timah sejak era reformasi.²⁴

Kesimpulan

Era reformasi sesungguhnya membawa perubahan besar dalam tatanam masyarakat di Indonesia. Berbagai perubahan yang terjadi, dan kesempatan bagi setiap orang untuk hidup lebih bebas dan merdeka menjadikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Hal ini terlihat pada masyarakat dua kota tambang yaitu Sawahlunto di Sumatera Barat dan Sungai Liat di Bangka.

Pada dua kota tambang ini, dapat dikatakan bahwa lebih dari satu abad masyarakat –penduduk asli setempat- hanyalah sebagai penonton dari pengerukan kekayaan alam mereka. Jika dahulu yang mengeruk kekayaan adalah kolonial Belanda, maka separoh abad terakhir ini adalah sebangsa sendiri. Namun, masyarakat tidak memiliki daya dan upaya untuk dapat menikmati kekayaan alam di tanah air mereka sendiri. Kalaupun ada masyarakat sekitar yang menikmati, maka mereka hanyalah sebagai buruh kasar, sehingga tingkat kesejahteraanpun rendah. Perubahan besar terjadi sejak era reformasi, dimana masyarakat memiliki kesempatan besar untuk dapat menikmati hasil alam mereka sendiri.

Keterlibatan rakyat dua kota ini dalam dunia tambang juga menjadi fenomena sendiri. Bisnis ini juga membutuhkan modal besar –terutama batu bara-,

²⁴ Wawancara dengan yusuf, seorang broker timah di Pangkal Pinang.

sehingga ketika membutuhkan modal ini, kembali masyarakat dihadapkan pada persoalan lama yaitu berhadapan dengan kapitalis. Bedanya, kapitalis sekarang adalah masyarakat dan pejabat, sehingga yang mengeksploitasi mereka juga para kapitalisme ini. Sementara untuk kasus timah, mereka tidak memerlukan modal besar, sehingga secara lebih sederhana mereka bisa menikmati hasil timah itu. Dengan modal piring plastik saja misalnya, mereka sudah bisa mencari timah pada pantai-pantai, ataupun tailing dari sebuah tambang.

Dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat dua kota tambang ini, setelah 60 tahun merdeka, setelah lebih satu abad penguasa dan pengusaha mengorek kekayaan alam mereka, maka sejak era reformasi inilah mereka baru dapat merasakan manisnya uang dari kekayaan alam mereka sendiri. Sebelum ini, jika kedatangan orang membawa timah di bangka misalnya, maka akan diburu-buru seperti penyalur narkoba. Sementara, di Sawahlunto, mau dibawa kemana batu bara itu, semua pemasaran dikuasai oleh pemerintah. Sekarang ini, setiap orang bisa saja menambang dan mencari pasaran sendiri, untuk memperjuangkan nasib anak dan istrinya ataupun sekedar bertahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta : PT Grafiti press, 1986
- Adeng Sunardi, *100 tahun Tambang Baru Bara Ombilin*. Sawah Lunto : Tanpa Penerbit, 1991.
- Ala AB. (ed), *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Alfian (ed), *Kemiskinan Struktural*. Jakarta : YISS, 1986
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta : Gunung Agung, 1984
- Booth, Anne (eds), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LPES, 1988
- BPS, *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976-1990*. Jakarta : BPS, 1992.
- Burke, Peter, *History and social Theory*. Cambridge, Polity Press, 1992.
- Chambers, R. *Pembangunan Desa : Dimulai Dari Belakang*. Jakarta : LPES, 1987.
- Erwiza, "Miners, Managers and the State: A Socio-Political History of the Ombilin Coal-Mines, West Sumatra 1892-1996". *Phd. Dissertation*. University Amsterdam (1999).
- Erwiza Erman *Illegal Mining in West Sumatra: Access, Actors, and Agencies In the Post-Suharto-era*. Makalah, 2 Agustus, 2004.
- Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda Beckman and Hands Marks (eds), *Coping with Insecurity, An "Underall" Perspective on Social Security in the Third World*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000.
- Geertz. C., *Penjaja dan Raja : Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- _____, *Mojokuto : Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta : Grafiti Pers, 1986.
- Greve, van. W.H. *Het Ombilin Kolenveld in padangsche Bovenlanden en het Transport Systeem ter Sumatra Westkust*. Den haag : Martinus Nijhoff, 1871

- Hungtinton, Samuel. P dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta, 1986
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Gramedia, 1981.
- Kuntowidjojo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana. 1993.
- _____, *Radikalisme Petani*. Bentang Press Intervisi Utama, '1993.
- Legg, Keith R, *Tuan, Hamba dan Politisi*. Jakarta : Sinar Harapan, 1983.
- Loekman Sutrisno, *Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta, 1997.
- Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Insist, 2001.
- Moleong L., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda, 1993.
- Nas, P.J.M. (eds.), *The Indonesian City*. Dordrecht: Foris Publications, 1986.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, 2000.
- Pangkal Pinang Dalam Angka, 1999*
- Pangkal Pinang Dalam Angka, 2000*
- Pangkal Pinang Dalam Angka, 2001*
- Pangkal Pinang Dalam Angka, 2002*
- Pangkal Pinang Dalam Angka, 2003*
- R.Yando Zakaria, *Abie Tandeh : Masyarakat Desa Dibawah Rezim Orde Baru*. Jakarta : LSAM, 2000.
- Rusli Amran, *Kota Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta : PT Sinar Harapan, 1987
- Sartono Kartodirodjo, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : LP3ES, 1983
- _____, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia, 1992.

- Schoorl, J.W. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Negara-negara Ber-kembang*, Jakarta: Gramedia, 1984
- Scott, James, *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Singh, Rejendra, *Social Movements : Old and New*. New Delhi : Sage Publications
- Sjoberg, Gideon *The Pre-industri City: Past and Present*. New York: The Free Press, 1966.
- Sutjipto Tjiptoatmioyo, “ Kota-kota Pantai di sekitar Selat Madura (abad XVII sampai medio Abad XIX)” *Disertasi Doktor* Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1983.
- Thee Kian Wie, *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*. Jakarta : Sinar Harapan, 1981.
- Weber, Max, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Jakarta : Pustaka Pramathea, 1999
- Weber, Max. “ Apakah yang Disebut Kota”, Terjemahan Darsiti Soeratman, dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial* Jakarta: Bhratara, 1977
- Yahya A. Muhaimin, *Busnis dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES, 1991
- Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan*. Yogyakarta : Insist Press, Desember 2002.
- _____. *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai*. Padang : Andalas University Press, 2006.
- Zulqayyim, “Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1942”. *Tesis*. Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana UGM, 1996.

Surat kabar

Surat kabar *Bangka Pos*

Surat kabar *Haluan*

Surat kabar *Mimbar Minang*

Surat Kabar *Singgalang*

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0